

## **ABSTRAK**

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia memberikan pengaturan mengenai Pengecualian monopoli atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran atas barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Persaingan Usaha. Pengaturan ini terealisasi pada Perusahaan Air PT.ATB salah satunya, Pada tahun 2008 PT.ATB dilaporkan melakukan praktek monopoli dengan pembatasan sambungan meteran air baru sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Pada pembelaannya PT.ATB menyatakan bahwa PT.ATB dikecualikan dari Pasal 17 UU Persaingan Usaha. Dasar kewenangan kegiatan PT.ATB adalah perjanjian Konsesi antara OB dan PT.ATB, dalam perjanjian tersebut OB selaku wakil dari Pemerintah menunjuk PT.ATB untuk melakukan pengelolaan air bersih di pulau Batam. Pada putusan KPPU Nomor: 11/KPPU-L/2008 menyatakan bahwa meskipun memiliki hak eksklusif kemudian bukan berarti PT.ATB bebas melakukan praktek monopoli yang merugikan masyarakat, sehingga majelis komisi menyatakan PT.ATB dinyatakan secara sah melanggar Pasal 17 UU Persaingan Usaha. PT.ATB kemudian mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri Batam yang kemudian menyatakan bahwa PT. ATB tidak melanggar Pasal 17 UU Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa PT.ATB merupakan perusahaan swasta yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan air bersih di pulau Batam, dan tetap tunduk pada Pasal 17 UU Persaingan Usaha.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Halaman Judul                                                                                              | i    |
| Halaman Persetujuan                                                                                        | ii   |
| Halaman Pengesahan                                                                                         | iii  |
| Pernyataan Keaslian                                                                                        | iv   |
| Kata Pengantar                                                                                             | v    |
| Abstrak                                                                                                    | vii  |
| Daftar                                                                                                     | viii |
| Daftar Lampiran                                                                                            | x    |
| Daftar Tabel                                                                                               | xii  |
| PENDAHULUAN                                                                                                | 1    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah                                                                                | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah                                                                                       | 4    |
| 1.3. Tujuan Penelitian                                                                                     | 5    |
| 1.4. Manfaat Penelitian                                                                                    | 5    |
| 1.5. Metode Penelitian                                                                                     | 6    |
| 1.5.1. Jenis Penelitian                                                                                    | 6    |
| 1.5.2. Metode Pendekatan                                                                                   | 6    |
| 1.5.3. Bahan Hukum                                                                                         | 6    |
| 1.5.4. Analisis Bahan Hukum                                                                                | 7    |
| 1.6. Keaslian                                                                                              | 8    |
| BAB II                                                                                                     | 10   |
| KAJIAN TEORI                                                                                               | 10   |
| PERBUATAN YANG DILARANG DAN UNSUR-UNSUR PASAL 51                                                           | 10   |
| UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999                                                                           | 10   |
| 2.1. Perbuatan Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999                                        | 10   |
| 2.2. Pengecualian Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999                                                              | 12   |
| 2.3. Unsur-Unsur Pengecualian Dalam Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999                                         | 16   |
| BAB III                                                                                                    | 24   |
| PENERAPAN PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999<br>TERHADAP PELAKU USAHA YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH | 24   |
| 3.1. Kriteria Monopoli yang dilarang dalam Pasal 51 UU Persaingan Usaha                                    | 24   |
| 3.2. Pertimbangan Hakim PN Batam Mengenai Praktek Monopoli PT.ATE Terkait<br>Pasal 51 UU Persaingan Usaha  | 29   |

|                                                           |                                                                                                            |    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.4.                                                      | Manfaat Penelitian .....                                                                                   | 5  |
| 1.5.                                                      | Metode Penelitian .....                                                                                    | 6  |
| 1.5.1.                                                    | Jenis Penelitian .....                                                                                     | 6  |
| 1.5.2.                                                    | Metode Pendekatan .....                                                                                    | 6  |
| 1.5.3.                                                    | Bahan Hukum .....                                                                                          | 6  |
| 1.5.4.                                                    | Analisis Bahan Hukum .....                                                                                 | 7  |
| 1.6.                                                      | Keaslian .....                                                                                             | 8  |
| BAB II .....                                              |                                                                                                            | 10 |
| KAJIAN TEORI .....                                        |                                                                                                            | 10 |
| PERBUATAN YANG DILARANG DAN UNSUR-UNSUR PASAL 51 .....    |                                                                                                            | 10 |
| UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 .....                    |                                                                                                            | 10 |
| 2.1.                                                      | Perbuatan Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....                                       | 10 |
| 2.2.                                                      | Pengecualian Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 .....                                                             | 12 |
| 2.3.                                                      | Unsur-Unsur Pengecualian Dalam Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 .....                                        | 16 |
| BAB III .....                                             |                                                                                                            | 24 |
| PENERAPAN PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999       |                                                                                                            |    |
| TERHADAP PELAKU USAHA YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH ..... |                                                                                                            | 24 |
| 3.1.                                                      | Kriteria Monopoli yang dilarang dalam Pasal 51 UU Persaingan Usaha .....                                   | 24 |
| 3.2.                                                      | Pertimbangan Hakim PN Batam Mengenai Praktek Monopoli PT ATB Terkait<br>Pasal 51 UU Persaingan Usaha ..... | 29 |
| 3.2.1.                                                    | Posisi Kasus .....                                                                                         | 29 |
| 3.2.2.                                                    | Pertimbangan Majelis Komisi .....                                                                          | 31 |
| 3.2.3.                                                    | Pembelaan Terlapor .....                                                                                   | 34 |
| 3.2.4.                                                    | Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam .....                                                   | 35 |
| 3.2.5.                                                    | Analisis Penerapan Pengecualian Pasal 51 Pada Praktek Monopoli Yang<br>Dilakukan PT ATB .....              | 39 |
| BAB IV .....                                              |                                                                                                            | 46 |
| PENUTUP .....                                             |                                                                                                            | 46 |
| 4.1.                                                      | Kesimpulan .....                                                                                           | 46 |
| 4.2.                                                      | Saran .....                                                                                                | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                      |                                                                                                            | 49 |
| BIODATA PENULIS .....                                     |                                                                                                            | 51 |
| Lampiran-Lampiran .....                                   |                                                                                                            | 52 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Nomor: 11/KPPU-L/2008..... 52
2. Putusan Nomor: 173 PK/Pdt.Sus/2011 ..... 53

## **DAFTAR SINGKATAN**

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| APEC  | : Asia Pasific Economic Cooperation     |
| AFTA  | : Asean Free Trade Area                 |
| ASEAN | : Association of Southeast Asian Nation |
| UUD   | : Undang-Undang Dasar                   |
| RI    | : Republik Indonesia                    |
| UU    | : Undang-Undang                         |
| BUMN  | : Badan Usaha Milik Negara              |
| BUMD  | : Badan Usaha Milik Daerah              |
| APBN  | : Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara  |
| SDA   | : Sumber Daya Air                       |
| CO    | : Company                               |
| LHPL  | : Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan    |
| KPPU  | : Komisi Pengawas Persaingan Usaha      |
| PT    | : Perseroan Terbatas                    |
| ATB   | : Adhya Tirta Batam                     |
| OB    | : Otorita Batam                         |
| PN    | : Pengadilan Negeri                     |
| DPD   | : Pengurus Daerah                       |
| REI   | : Realestat Indonesia                   |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Bentuk Perjanjian yang Dilarang .....    | 11 |
| Tabel 2.2 Bentuk Kegiatan yang Dilarang .....      | 11 |
| Tabel 2.3 Posisi Dominan Yang Dilarang.....        | 12 |
| Tabel 2.4 Tindakan Tetentu Yang Dikecualikan ..... | 15 |